Globethics Repository



Jati Diri Melayu dan Multikulturalisme

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Rehayati, Reni
Publisher	UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-12 14:28:41
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/225696

Jati Diri Melayu dan Multikulturalisme[1]: Kontekstualisasi Jati Diri Melayu di Era Global

Oleh: Rina Rehayati[2]

Abstract

Malay Identity and multiculturalism: Contextualization of Malay Identity in the Global Era

On the basis of Islamic values, philosophy of life developed by the Malay known earlier so wise, and seek to avoid conflicts exist with malaynese polite and understated. The success of the Malays formerly very strong with their identity needs to be transformed to the current generation. Therefore, efforts need to be examined to be done so that the glories of the Malay identity persisted, despite the world changing in any form.

Keywords*: identity, Malay, Multiculturalism*

Pendahuluan

Sejarah gemilang eksistensi Melayu (baca: Melayu Riau) pada masa lalu sangat membanggakan bagi orang Melayu dan selalu dikenang dari masa ke masa. Kegemilangan Melayu masa lalu ditandai dengan kekhasan jati diri Melayu yang santun, bersahaja, dan mampu beradaptasi dengan beragam kultur dengan tidak melepas kemelayuannya. Sejarah mencatat bahwa begitu banyak bermunculan para penulis, ulama, dan cendekiawan Melayu, sehingga tidak berlebihan kemudian bahasa Melayu pun dinobatkan sebagai bahasa Nasional. Keputusan mengangkat bahasa Melayu sebagai Bahasa Indonesia tentu telah dikaji secara mendalam dan dipertimbangkan dengan matang oleh para pahlawan yang berbeda kultur pada saat itu, baik ditinjau dari aspek sosial, politis, maupun psikologis. Namun, sangat disayangkan, seiring dengan perkembangan zaman yang diiringi dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, gaung pengaruh Melayu saat ini serasa tidak sekuat masa lalu. Kondisi ini menggambarkan bahwa pola hidup dan termasuk juga perkembangan pemikiran Melayu "perjalanannya" tidak beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kajian Melayu saat ini seolah hanya sebatas kajian sejarah, antropologi, dan pagelaran acara yang sarat dengan simbol-simbol Melayu untuk mengenang masa kejayaan dan kegemilangan masa lalu saja. Baik itu melalui simbol pakaian, bangunan, tarian, dan sebagainya. Karya-karya orang Melayu tidak lagi signifikan dan monumental sebagaimana karya masa lalu. Sehingga, wajar kemudian ada kekhawatiran di kalangan orang Melayu kegemilangan Melayu yang pernah diraih pada masa lalu akan redup dengan pudarnya jati diri Melayu di tengah era global.

Kekhawatiran sebagian orang Melayu terhadap realitas di atas muncul dikarenakan sedemikian cepatnya perubahan sosial pada masyarakat Melayu akibat perkembangan ilmu pengetahuan, arus informasi, transportasi, dan teknologi. Realita komposisi masyarakat yang multikultural di wilayah Melayu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat, sementara pengetahuan masyarakat melayu untuk membendung beragam informasi yang diterima dari berbagai media cetak dan elektronik tidak berimbang menyebabkan jatidiri Melayu "tergoyang" ibarat berada di tengah gelombang samudra yang sedemikian luas (Pekanbaru Pos, 27 Des 2011).

Kondisi ini menjadi masalah karena derasnya arus informasi yang dibawa oleh teknologi bukan hanya menawarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga menawarkan gaya hidup Barat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam yang dianut oleh Orang Melayu, termasuk juga beragam ideologi, yang ternyata tidak seluruhnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga semboyan atau filosofi hidup Melayu *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah* berhadapan langsung dengan beragam tawaran ideologi, tradisi, dan budaya dari luar yang tidak seluruhnya sesuai dengan adat dan budaya Melayu. Dalam konteks inilah kemudian menurut peneliti konsep multikulturalisme relevan dikemukakan dalam dunia Melayu agar nilai-nilai Islam yang menjadi prinsip hidup bagi orang Melayu tetap kuat dalam kehidupan khas Melayu dan jati diri Melayu tetap kokoh di tengah arus globalisasi.

Orang Melayu perlu mempelajari perangkat apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi serbuan tawaran ideologi dunia non Melayu tersebut. Dan selanjutnya, mengembangkan "nalar" Melayu yang bekerja kreatif, kuat dan beridentitas khas Melayu.

Ada dua pandangan yang berkembang dalam menanggapi multikulturalisme, yaitu pandangan positif dan pandangan negatif. Bagi yang berpandangan positif, cenderung melihat multikulturalisme sebagai realitas, suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Sedangkan bagi yang berpandangan negatif, cenderung melihat multikulturalisme sebagai *ideologi.*

Filosofi hidup Melayu yang dikembangkan oleh orang Melayu terdahulu dikenal sedemikian bijak, berupaya menghindari konflik dan tetap eksis dengan kemelayuannya yang santun dan bersahaja, karena Islam mengajarkan demikian. Keberhasilan orang Melayu dahulu yang sangat kuat dengan jatidirinya perlu ditransformasi kepada generasi saat ini. Oleh sebab itu, perlu ditelisik lebih dalam upaya apa saja yang harus dilakukan sehingga kegemilangan jatidiri Melayu tetap bertahan, meskipun dunia berubah dalam bentuk apa pun.

Multikultural dan Pluralitas sebagai Realitas

Konsep Multikulturalisme sangat terkait dengan kultur, karena kultur menjadi fokus utama pembahasan multikulturalisme. Menurut Claude Levi Strauss, seperti dikutip oleh Edith Kurzweil (2004: 29), kultur adalah refleksi dari struktur biologis yang universal dari pikiran manusia. Sedangkan Clifford Geertz (1992: 2-3) berpendapat bahwa kultur adalah cara yang dipakai oleh semua anggota dalam sebuah kelompok masyarakat untuk memahami siapa diri mereka dan kemudian memberi arti pada kehidupan mereka. Dari pendapat Levi Strauss dan Geertz diketahui bahwa "ada" nya kultur tidak "berada" begitu saja, melainkan diupayakan melalui olah pikir oleh sekelompok orang dalam upaya untuk memahami, memberi arti, dan memberi identitas pada diri mereka, sehingga identitas kelompok mereka sebagai "pembeda" dengan kelompok lain jelas terlihat. Inilah tantangan bagi Kultur Melayu yang memiliki semboyan adat: "*Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah. Biarlah mati anak daripada mati adat. Mati anak gempar sekampung, mati adat gempar sebangsa."*

Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan kultur Melayu Riau seperti penelitian Antropologi Budaya di Riau oleh Parsudi Suparlan pada tahun 1982. Fokus penelitiannya mengenai Orang Sakai sebagai masyarakat terasing di Riau. Hasil Penelitian Parsudi Suparlan ini kemudian dibukukan pada tahun 1995. Hasil penelitian ini bukan hanya mendeskripsikan kehidupan masyarakat terasing, tetapi juga disertai dengan penjelasan mengenai berbagai budaya dan kondisi geografi Riau yang sedemikian luas, terdiri dari Riau daratan dan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau saat ini sudah menjadi provinsi sendiri. Penulisan buku Suparlan merupakan proyek Departemen Sosial mengenai pemulihan pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing.

Buku yang terkait dengan Melayu kekinian misalnya buku Isjoni, *Orang Melayu di Zaman yang Berubah* (2007), yang mendeskripsikan tentang asal-usul orang Melayu, kehidupan orang Melayu, agama Orang Melayu serta globalisasi sebagai tantangan bagi orang Melayu kontemporer dalam menata masa depan. Isjoni melihat adanya perubahan kuantitatif dan kualitatif dalam kehidupan orang Melayu. Menurut Isjoni, perkembangan ilmu pengetahuan yang sedemikian cepat dan melahirkan teknologi modern telah menimbulkan benturan-benturan yang cukup jauh dalam kecenderungan gaya hidup orang Melayu kontemporer. Menurutnya, kebesaran dan kemajuan yang pernah dicapai orang Melayu pada masa lalu mestinya juga diwujudkan pada masa depan. Untuk itu, ke depannya, orang Melayu harus melakukan tindakan rasional dan menemukan konsepsi yang relevan dengan masa kini. Isjoni hanya mendeskripsikan dan memberikan stimulan berupa permasalahan untuk dipikirkan secara bersama, dan selanjutnya diharapkan banyak tawaran konsep bagi akademisi Melayu untuk menanggapi stimulan Isjoni tersebut.

Informasi tentang Melayu juga terdapat pada buku-buku karya orang Melayu Riau sebagai berikut: *Studi Melayu* (Yusmar Yusuf, 2009), *Orang Melayu* (Isjoni, 2002), *Teks dan Pengarang di Riau* (Hamidy, 1998), *Riau Doeloe-Kini dan Bayangan Masa Depan* (Hamidy, 2002), *Orang Melayu di Riau* (Hamidy, t.th), *Good Governance dalam Perspektif Budaya Melayu* (Hamidy [ed.], 2004), *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi* (2009), dan sebagainya.

Para penulis Melayu di atas mengungkapkan filosofi dan sistem nilai kultur Melayu karena memang pada setiap kultur akan ditemui sejumlah sistem nilai yang membentuk dan mewarnai pandangan hidup kultur tersebut. Sistem nilai bagi kultur merupakan tingkat tertinggi dan paling abstrak. Sistem nilai tersebut merupakan konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai sangat berharga dan merupakan pandangan dunia (*world view*) mereka. Pada sistem nilai Melayu misalnya, dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: agama, adat, dan bahasa yang digunakan. Sebagaimana menurut pendapat beberapa tokoh Melayu bahwa seseorang atau sekelompok orang dikategorikan sebagai orang Melayu apabila dia beragama Islam, sehari-hari berbahasa Melayu, dan beradat istiadat Melayu. Etnis Melayu ditentukan oleh kultur, bukan geneologis (keturunan darah) (Ismail Hussein, 2001: 18-19; UU. Hamidy, t.th.: 8; Isjoni, 2002: 50). Dalam konteks inilah dapat dilihat identitas Melayu dan perbedaan antara kultur Melayu dengan kultur lain. Pada kultur di luat Melayu, etnis mereka ditentukan oleh geneologis, sedangkan Kultur Melayu melihat pada ketiga aspek di atas, yakni agama yang dianut, bahasa sehari-hari yang digunakan dan adat istiadat yang diterapkan dalam "lingkar kehidupan" seperti: kelahiran, pernikahan, dan kematian.

Adapun Peneliti asing yang pernah meneliti tentang Melayu misalnya J.S. Furnivall, seorang administrator dan penulis politik Inggris. Melalui tulisannya dia memperkenalkan Asia Tenggara di dunia Barat dengan mengidentifikasi negara-negara yang dia sebut sebagai masyarakat majemuk, seperti: Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kemajemukan tersebut merupakan warisan sekaligus tantangan pluralitas budaya. Menurut Furnivall, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaur dalam satu unit politik. Hefner (2011) memberi contoh berbaurnya Orang Melayu, Cina, India, dan Arab sebagaimana di Malaysia. Hefner pun mengutip pendapat Walzer (1996) yang merasa heran dengan perilaku berbagai kultur di wilayah Melayu. Menurutnya, ada sesuatu yang ironis pada kultur Melayu, mereka siap dalam mengakomodir pluralitas kepentingan-kepentingan *utilitarian*[3] di antara para pembeli dan penjual di pasar, tetapi ketika sampai pada kehidupan publik dan politik, mereka tidak siap menghadapi kemajemukan kultur tersebut. Terkait dengan pendapat Walzer, UU. Hamidy (t.th.: 11) juga berpendapat bahwa sejak masa lalu, kultur Melayu bisa menerima dan bisa bergaul dengan kultur apa pun. Pergaulan dengan kultur lain itu hanya sebatas di kota-kota pelabuhan. Kota-kota pelabuhan yang dimaksud oleh UU. Hamidy kegiatan jual-beli dalam berdagang yang dilakukan antar kultur di Selat Malaka. Selaras dengan pendapat Furnival yang mengatakan bahwa penerimaan Kultur Melayu terhadap kultur lain hanya sebatas pluralitas kepentingan-kepentingan *utilitarian* di antara para pembeli dan penjual di pasar, bukan pada aspek sosial dan politik, karena mereka belum siap menerima perbedaan dan memberi pengakuan kesederajatan sebagaimana yang dikehendaki konsep multikulturalisme.

Furnivall, Miller, Hefner dan Hamidy berpendapat yang sama tentang "sikap" Orang Melayu terhadap *plural society.* Mereka sepakat bahwa pada aspek ekonomi dan sosial, kultur Melayu bisa mengakomodir *plural society,* tetapi tidak pada kehidupan publik dan politik. Sehingga, aspek sosial dan politik menjadi sesuatu yang amat riskan dibicarakan secara luas dan cenderung monokultur. Suatu kultur yang cenderung dibentuk monokultur oleh penguasanya, tetap ada bias tatkala kultur tersebut dominan. Pengertian "mono" bermakna satu, penyatuan atau penyeragaman. Sedangkan multikulturalisme yang menekankan "multi" yang berarti banyak, beragam dan majemuk. Di satu sisi, keberagaman kultur dalam kultur yang multikultural yang menginginkan keseragaman bila tidak diwaspadai akan memunculkan ketegangan, dan rawan konflik. Tetapi, di sisi lain, ketegangan itu tidak selamanya mengarah pada sesuatu yang negatif karena ketegangan bisa menjadi kekuatan apabila disikapi dengan bijak. Ketegangan menjadi positif apabila dikelola menjadi kreativitas. Meminjam istilah Karl Jaspers, dalam kehidupan ini biarkan saja tetap ada ketegangan antara *dasen* dan *eksistens,* karena dibalik ketegangan tersebut sesungguhnya mengandung dinamika kehidupan. Jika dipaksakan menyatukan antara keduanya, maka satu sama lainnya akan kehilangan identitas (*nihilisme*) dan kekhasan keberadaan (*materialisme*) masing-masingnya. Bila diterjemahkan, ketegangan yang dimaksud oleh Jaspers, membiarkan ketegangan bukan berarti menutup diri, karena sewaktu-waktu "meledak" menjadi konflik. Tetapi, setiap kultur hendaknya mampu mendesain ketegangan menjadi kreativitas dalam menemukan format-format yang tepat untuk bisa membentuk kesepahaman dalam keberagaman. Bisa melalui dialog, diskusi, seminar

pertunjukkan seni atau festival berbagai kultur, dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut tidak efektif jika masing-masing kultur mempertunjukkan sikap egonya, karena tidak akan menghasilkan kreativitas, melainkan menimbulkan pertikaian.

Macam-macam Multikulturalisme

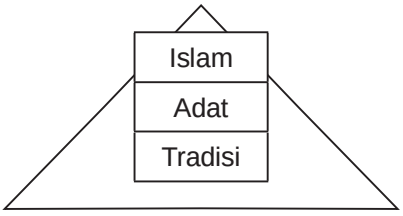
Istilah multikulturalisme sebenarnya belum lama menjadi objek pembicaraan (sekitar abad ke-20) oleh berbagai kalangan. Namun dengan cepat berkembang sebagai wacana yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Dikatakan menarik karena membicarakan keragaman etnis dan budaya, serta penerimaan terhadap keberagaman tersebut. Istilah ini, setidaknya memiliki tiga unsur, yaitu: budaya, keragaman budaya, dan cara khusus untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut.

Untuk menentukan bentuk multikulturalisme Melayu di Riau bisa ditelusuri dari berbagai macam multikulturalisme yang dikemukakan oleh ahli Multikulturalisme. Menurut Bikhu Parekh ada lima macam multikulturalisme, yaitu: *pertama,* multikulturalisme *isolasionis,* yakni multikulturalisme yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. *Kedua,* multikulturalisme *akomodatif*, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga,* multikulturalisme *otonomis,* yaitu masyarakat majemuk yang masing-masing kelompok kultur berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan kultur dominan dan berkeinginan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Tujuan utama kelompok kultural pada pola ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka dan memiliki hak yang sama dengan kelompok yang dominan. Mereka menentang kelompok kultur dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat dimana semua kultur dapat eksis sebagai mitra sejajar. *Keempat,* multikulturalisme *kritikal* atau interaktif, yakni masyarakat majemuk yang menginginkan terciptanya kultur kolektif, tetapi mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif *distingtif* mereka tanpa harus menciptakan kultur otonom. *Kelima,* multikulturalisme *kosmopolitan*, yakni paham yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan masyarakat yang masing-masing individu tidak terikat kepada budaya tertentu. Sebaliknya, mereka secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing (http://www.wikipedia.or/wiki/multikulturalisme, diakses 31 Desember 2010; Azyumardi Azra, 2007: 13-16).

Sistem Nilai Melayu: Islam, Adat Melayu, Bahasa Melayu

Sistem nilai Melayu dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: agama, adat, dan bahasa yang digunakan. Dalam konteks inilah dapat dilihat identitas Melayu dan perbedaan antara kultur Melayu dengan kultur lain. Pada kultur lain etnis mereka ditentukan oleh geneologis, sedangkan Kultur Melayu melihat pada ketiga aspek di atas, yakni agama yang dianut, bahasa sehari-hari yang digunakan dan adat istiadat yang digunakan dalam "lingkar kehidupan" seperti: kelahiran, pernikahan dan kematian. Meskipun hanya mengakui Islam sebagai agama resmi, namun kultur Melayu sangat terbuka dan tidak pernah menolak kedatangan kultur lain yang berbeda agama, etnis, bahasa, bangsa, negara, dan sebagainya. Sebagaimana yang ditulis oleh Hamidy (2004: 47), bahwa wilayah Melayu komposisi masyarakatnya majemuk. Kemajemukan tersebut selain membuat Orang Melayu menjadi luas wawasannya, berkembang ilmu pengetahuannya juga memberi peluang bersatunya keberagaman kultur. Melayu dan Islam dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Melayu berkembang karena Islam dan Islam merupakan Jatidiri kultur Melayu (Heddy Shri Ahimsa-Putra, [ed.], 2007: 73-74).

Gambaran Segi tiga Sistem Nilai Melayu sebagai berikut:



Segi tiga di atas dapat diinterpretasikan bahwa tradisi yang sedemikian banyak muncul dalam kehidupan Orang Melayu akan menyesuaikan dengan Adat. Jika sesuai dengan adat, maka tradisi tersebut tidak dilarang untuk dikembangkan. Tetapi, jika tidak sesuai menurut adat, maka tradisi tersebut tidak boleh dikembangkan. Ukuran adat untuk membenarkan atau melarang suatu tradisi berdasarkan *syari'at* Islam

yang diterjemahkan oleh ulama setempat. Meskipun raja dan sesepuh adat yang diberi wewenang menguasai, namun keputusan boleh atau tidaknya mengembangkan suatu tradisi dan pemikiran tetap berada di tangan ulama.

Kesultanan Melayu berhasil mengembangkan agama Islam, terutama pada masa pemerintahan Yang Tuan Muda Raja Abdul Rachman (1833-1844), Yang Tuan Muda Raja Ali (1845-1857), dan Yang Tuan Muda Raja Abdullah (1857-1858). Pada masa itu, telah didatangkan ahli agama dari luar, seperti Syekh Ahmad Jabrati, Syekh Muhammad Arsyad Banjar, dan Sayid Abdullah Bahrin (Sham, 1980). Dalam pengembangan agama Islam, juga dikembangkan satu aliran tarekat, yaitu Tarekat Naqsyabandiah. Tarekat ini dikembangkan oleh pemerintah mulai dari pemerintahan Yang Dipertuan Muda Raja Ali (1845-1857) sampai Raja Mohammad Yusof dari Penyengat. Tarekat ini berkembang ke Babussalam, Langkat Sumatera Utara, Semenanjung Melayu, serta Singapura dan sekitarnya. Penyengat kemudian berhasil dikembangkan sebagai pusat agama, bahasa dan sastra, adat dan kesenian Melayu yang sampai sekarang masih dapat disaksikan peninggalan dan bekas-bekasnya (Heddy Shri Ahimsa-Putra, [ed.], 2007: 74-75).

Jauh sebelum kemerdekaan, ada beberapa ilmuwan Belanda yang memberi komentar tentang Melayu, di antaranya Vallentinjn (1712), C. Lekkerker (1916) dan Prof. J.V. Van Eerde (1919). Para ilmuwan tersebut menulis bahwa orang Melayu masyarakat yang enerjik, sopan, dan gigih mempelajari dan menyebarkan Islam. Berkembangnya Islam di Nusantara dan di Asia Tenggara termasuk atas kegigihan para ulama Melayu dengan cara berlayar (Isjoni, 2002: 47-49). Islam mewarnai seluruh tradisi kultur Melayu dengan semboyan "*adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah."* Terkait dengan hal ini, keistimewaan Islam juga diakui oleh intelektual Barat, Ernest Gellner (1981: 4) yang berpendapat bahwa hanya Islam yang esensi ajarannya tetap relevan dengan tuntutan segi positif modernitas.

Pantun sebagai Simbol dalam Falsafah Melayu

Orang Melayu umumnya pandai berpantun. Orang Melayu kerap menggunakan pantun dan pepatah sebagai "bahasa halus" ketika berkomunikasi. Sopan santun yang diperlihatkan orang Melayu kepada kultur lain atau bangsa lain mereka ungkapkan melalui bahasa lisan dengan bait pantun. Sehingga, pantun dikenal sebagai ciri khas dan keunikan bagi orang Melayu (Ediruslan Pe Amanriza dan O.K. Nizami Jamil, 218-219). Sebagaimana pendapat Ding Cho Ming dalam tulisan Darwis A. Soelaiman: "*Pantuns not only embodies the philosophy, values, culture, wisdom, imagination anda life of Malays world people, but also has been playing a prominent social symbol in the Malay world all along* (Mahyudin al-Mudra dalam Abdul Kadir Ibrahim, 2004: 463). Jadi, pantun selain sebagai filosofi, nilai, budaya dalam dunia Melayu, juga sebagai simbol sosial bagi orang Melayu yang sangat berperan penting dalam komunikasi multikultural dalam realitas kehidupan orang Melayu dari dulu sampai sekarang.

Pantun, pepatah dan gurindam[4] merupakan simbol dalam kehidupan Melayu, digunakan oleh orang Melayu sebagai media untuk mengkomunikasikan nilai-nilai tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Pantun dan pepatah digunakan oleh orang Melayu jauh sebelum mereka mengenal tulisan dan terus berlangsung hingga saat ini (Mahyudin al-Mudra dalam Abdul Kadir Ibrahim, 2004: 465). Dengan demikian, pantun, pepatah, dan gurindam yang terkesan sederhana, ternyata memiliki peranan penting bagi orang Melayu, yakni sebagai penjelas terhadap konsep, ide-ide, dan gagasan yang masih abstrak. Gagasan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata kemudian dirujuk kepada benda-benda yang ada di sekitar kehidupan mereka. Tujuannya agar pesan moral yang masih bersifat abstrak dapat dipahami oleh pendengar. Contoh pepatah tentang adat Melayu sebagai berikut:

> *"Adat di atas tumbuhnya, mufakat di atas dibuatnya",*
> *"Biar mati anak daripada mati adat"*
> *"Mati anak gempar sekampung, mati adat gempar sebangsa"*
> *"Adat itu tidur menjadi tilam,*
> *jika berjalan menjadi payung,*
> *jika di laut menjadi perahu,*
> *jika di tanah menjadi pusaka"* (Isjoni, 2002: 50).

> *Bulat lengkungan menjadi lembaga,*
> *Bulat lembaga menjadi undang-undang,*
> *Bulat undang-undang menjadi keadilan* (UU. Hamidy, 2004: 46).

> *Bulat air karena pembetungan,*
> *Bulat manusia karena mufakat;*
> *Faham sesuai,*
> *Benar seukur,*

Bulat segolek,
Pipih selayang.
Rundingan jangan selisih,
Mufakat jangan bercanggahan;
Tuah pada sekata,

Berarti pada seiya (UU. Hamidy, 2004: 47).

Esa elang dua belalang,
Takkan kayu berbatang jerami
Esa hilang dua terbilang
Takkan Melayu hilang di bumi" (Isjoni, 2002: 53).

Dalam setiap kesempatan, orang Melayu dibiasakan berpantun dan berpepatah, mulai dari usia kanak-kanak sampai generasi tua. Oleh sebab itu, bila berada di wilayah Melayu, akan cukup mudah menemukan orang berpantun, baik ketika penyampaian pidato resmi, ketika bermusyawarah, dan ketika berdakwah. Bisa dikatakan bahwa pantun merupakan *world view*-nya orang Melayu. Sehingga apabila berpidato tanpa pantun, dianggap tidak berada di negeri Melayu. Bukan hanya pantun, pepatah, dan gurindam juga menjadi simbol orang Melayu, bahkan "warna" kain juga dijadikan simbol oleh mereka dan juga sebagai filosofi hidup Melayu. Pemaknaan tentang "warna" sebagai sistem nilai dalam kultur Melayu merupakan pedoman bagi orang Melayu dalam menginterpretasi dan mengadopsi dunianya. "Warna" menjadi penting karena warna mempunyai makna dan arti tertentu yang diproyeksikan sebagai lambang dalam kehidupan manusia, sehingga jadilah warna memiliki makna kultural. Bagi orang Melayu, warna kuning merupakan simbol status raja dan anak-anak raja. Simbol warna menunjuk kepada status seseorang diungkapkan sebagai berikut:

"Jika orang bergelar itu patut bergajah, dibawa gajah;

Yang patut berkuda dibawa berkuda; dan jika tiada patut

Bergajah dan berkuda, tapi ada payung itu ada hijau, ada biru, ada merah. Payung kuning untuk anak-anak raja dan orang-orang besar dengan payung ungu dan merah dan hijau itu untuk sida-sida dan bentara

Hulu balang biru dan hitam itu akan payung orang bergelar juga...." (Achmad Sopandi Hasan dalam Abdul Kadir Ibrahim, 2004: 26).

Bagi Orang Melayu Malaysia pepatah di atas menunjukkan kedudukan warna sebagai simbol status dalam kehidupan orang Melayu. Warna menunjukkan status dan pangkat seseorang. Menurut Raja Fauziah, sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Sopandi dalam Abdul Kadir Ibrahim, 2004: 30), Citra warna sebagai *iconic message* dituturkan melalui pantun oleh ketua adat Melayu ketika menyampaikan pesan leluhur mengenai adat-istiadat yang bernilai sakral, dan diyakini sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku hidup masyarakat Melayu untuk memperoleh kebahagiaan dan terhindar dari musibah. Terkait dengan simbol warna, berarti ada perbedaan status manusia yang disimbolkan dengan warna-warna tertentu. Jika di Barat yang diperjuangkan dalam konsep multikulturalisme adalah penerimaan dan pengakuan terhadap perbedaan warna kulit, maka dalam realitas kehidupan Melayu (masa kerajaan) adalah perbedaan status dalam masyarakatnya yang disimbolkan dengan warna kain, baik di payung, pakaian, dan pada atribut upacara adat. Pembedaan ini dikarenakan pengaruh sistem pemerintahan Kerajaan di Malaysia. Sebagaimana ungkapan puteri raja ketika dia berbicara kepada hulu balangnya (tentara kerajaan): "...*Jika orang bergelar itu patut bergajah, dibawa gajah; Yang patut berkuda dibawa berkuda; dan jika tiada patut bergajah dan berkuda*..." dan seterusnya. Maksud kalimat ini menurut penulis, dia ingin mengatakan sesuaikan penggunaan kendaraan, warna kain, dan warna payung yang digunakan dengan status dan kedudukan seseorang di kerajaan. Bagi orang Melayu Riau, "warna" tidaklah dimaknai sebagai simbol status, melainkan sebagai ciri khas dari orang Melayu. Warna kuning sebagai warna lingkungan kerajaan di Malaysia, dipakai oleh hampir seluruh lapisan masyarakat melayu dan mendominasi pada perlengkapan pada upacara adat istiadat Melayu, baik Melayu di Malaysia, Singapura, termasuk di Riau sebagai *proto type* Melayu di Indonesia.

Perangkat simbol yang terdapat dalam kultur Melayu tersebut berasal dari kerajaan-kerajaan Melayu yang besar di masa lampau, yang kemudian banyak mewarnai kehidupan Orang Melayu dan mendapat pengakuan dari sukubangsa lain sebagai perangkat simbol Melayu. Perangkat simbol ini menurut Supardi Suparlan berupa "kombinasi seperangkat motif dan nilai-nilai abstrak." Perangkat Simbol ini merupakan kerangka acuan yang penting bagi Orang Melayu dalam berinteraksi dengan sesama Orang Melayu dan mereka yang bukan Melayu. Ciri-ciri perangkat simbol Melayu tersebut menggambarkan "keramahtamahan dan keterbukaan" yang dapat "mengakomodasi perbedaan." Ciri-ciri tersebut

menurut Supardi Suparlan merupakan hasil dari pengalaman sejarah kebudayaan Melayu yang selama berabad-abad telah berhubungan dengan kebudayaan asing (Heddy Shri Ahimsa-Putra, [ed.], 2007: ixv). Dengan kata lain, Orang Melayu memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyerap unsur-unsur budaya dari sukubangsa lain. Ini menggambarkan kekayaan simbol yang terdapat dalam ruang lingkup kehidupan Orang Melayu.

Pandangan Tokoh Melayu terhadap *Plural Society* dan Multikulturalisme Pada Kultur Melayu

Berkenaan dengan ini, UU. Hamidy (t.th.: 11) juga berpendapat bahwa sejak masa lalu, kultur Melayu bisa menerima dan bisa bergaul dengan kultur apa pun dan dari manapun, tetapi itu hanya dalam batas-batas sosial budaya saja, sejauh tidak melanggar *syari'at* Islam. Pergaulan dengan Kultur lain itu hanya sebatas di kota-kota pelabuhan. Kota-kota pelabuhan yang dimaksud oleh UU. Hamidy adalah kegiatan jual-beli dalam berdagang yang dilakukan antar kultur di wilayah Melayu (Asia Tenggara). Selaras dengan pendapat Furnival yang mengatakan bahwa penerimaan Kultur Melayu terhadap Kultur lain hanya sebatas pluralitas kepentingan-kepentingan *utilitarian* di antara para pembeli dan penjual di pasar, bukan pada aspek sosial dan politik, karena mereka belum siap menerima perbedaan dan memberi pengakuan kesederajatan sebagaimana yang dikehendaki konsep multikulturalisme. Sehingga aspek sosial dan politik menjadi sesuatu yang amat riskan dibicarakan secara luas dan cenderung monokultur.

Dengan demikian, baik intelektual Barat maupun tokoh Melayu berpendapat sama mengenai "sikap" Orang Melayu terhadap *plural society.* Mereka sepakat bahwa pada aspek ekonomi dan sosial, kultur Melayu bisa mengakomodir *plural society,* tetapi tidak pada kehidupan publik dan politik.

"Multikulturalisme Butik": Masyarakat Multikultural yang Patut diwaspadai bagi Orang Melayu

Dalam penelitian Supardi Suparlan tentang Orang Melayu ditulis bahwa Orang Melayu secara ekonomi tidak seagresif kultur pendatang di wilayahnya, misalnya kultur Minang dan Batak. Orang Melayu dikenal sebagai kultur yang religius dan secara ekonomi tidak agresif. ketidakagresifan orang Melayu menggambarkan bahwa orang Melayu cenderung tenang dalam berinteraksi, baik dengan sesama kelompok sosial mereka maupun dengan kultur lain. Dalam ketenangan hidup bersama antar kultur (multikultur) tersebut patut juga disadari, jangan sampai yang tercipta adalah "multikulturalisme butik" suatu istilah yang digunakan oleh Stanley Fish, untuk menjelaskan bentuk multikulturalisme pada wilayah multikultural yang rawan konflik,[5] sebagaimana yang terjadi di Poso, Ambon, dan Lampung, yang sepertinya terlihat tenang, tetapi tatkala ada pemicu ketegangan (konflik), terjadilah konflik horizontal, dan tak jarang berakhir dengan kekerasan dan berdarah-darah. Demikian yang kita lihat di Ambon-Poso, Kalimantan, Papua, Jawa Barat, Lampung, dan sebagainya. Ketegangan dan konflik horizontal di beberapa wilayah tersebut perlu dipelajari gejala-gejalanya, sehingga kultur Melayu Riau *survive* tatkala menghadapi tantangan multikulturalisme di era global saat ini. Melayu tetap *eksis* dengan kemelayuannya di tengah keberagaman. Dengan demikian, multikultur tidak harus dihindari dengan menjadikan monokultur, karena justru akan menimbulkan masalah.

Suatu kultur yang cenderung dibentuk mono-kultur oleh penguasanya, tetap ada bias tatkala kultur tersebut dominan. Pengertian "mono" bermakna satu, penyatuan atau penyeragaman. Berbeda dengan Multikulturalisme yang menekankan "multi" yang berarti banyak, beragam dan majemuk. Keberagaman dalam kultur yang seragam bila tidak diwaspadai akan memunculkan ketegangan dan rawan konflik. Konflik cenderung terjadi apabila *term* yang dikembangkan *kami* dan *kamu,* bukan *kita.* Karena, jelas ada perbedaan makna antara *kami, kamu,* dan *kita*. Tetapi, ketegangan itu tidak selamanya negatif karena ketegangan bisa menjadi kekuatan jika disikapi dengan bijak.

Oleh sebab itu, perlu disadari oleh setiap individu dalam suatu kultur bahwa keberagaman sudah dirancang oleh Sang Pencipta, tidak ada satu pun yang bisa menolaknya. Allah memang sengaja menciptakan perbedaan–berdasarkan tingkat rasionalitas masing-masing manusia–karena sekiranya Allah SWT menghendaki, niscaya manusia dijadikan-Nya satu umat saja atau satu kultur saja. Tetapi, Allah hendak menguji manusia atas pemberian-Nya. Allah pun memerintahkan manusia berlomba-lomba berbuat

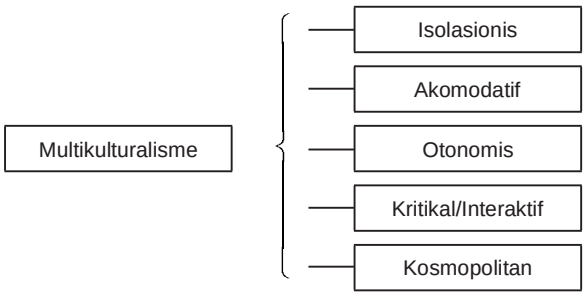
kebajikan. Hanya kepada Allah jualah kembali semua manusia, lalu diberitahukan-Nya tentang apa-apa yang telah manusia perselisihkan (Q.S. 5: 48; Q.S. 49: 13). Interpretasi atau penafsiran Ayat al-Qur'an ini kemudian diurai dalam pepatah Melayu sebagai berikut:

Seikat seperti sirih,
Serumpun seperti serai;
Seciap seperti ayam,
Sedencing seperti besi;
Malu tak boleh di agih,
Suku tak boleh dianjak;
Melompat sama patah,
Menyerudup sama bengkok;
Jalan sedundun,
Selenggang seayun (UU. Hamidy, 2004: 49).

Pepatah Melayu di atas menggambarkan bahwa kultur Melayu sangat mengakomodir kultur lain di wilayah Melayu. Meskipun yang diwujudkan tidak seperti apa yang terkandung dalam paradigma multikulturalisme,[6] namun setidaknya terpenuhi hal yang fundamental dalam multikulturalisme, yakni menerima dan mengakui "keberadaan" kultur lain. Memang, untuk menciptakan tatanan kultur Melayu yang multikultural tentulah tidak mudah, karena paling tidak, membutuhkan beberapa konsep yang mendukung untuk terwujudnya tatanan multikultural yang betul-betul berpijak pada konsep yang kuat sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh kondisi lingkungan. Oleh sebab itu, untuk kultur Melayu sejak dulu telah menerima tatanan kehidupan yang multikultural perlu diperkuat dengan konsep-konsep yang berkembang di era post-modern, agar Orang Melayu *go international,* dikenal dan diakui oleh dunia, bukan hanya Indonesia. Dalam hal inilah kemudian perlu dipahami konsep multikulturalisme yang berkembang di Era Post-Modern saat ini.

Bentuk Multikulturalisme Melayu: Suatu Tawaran

Untuk menentukan bentuk multikulturalisme Melayu di Riau bisa ditelusuri dari berbagai macam multikulturalisme yang dikemukakan oleh ahli Multikulturalisme. Misalnya pemetaan yang dilakukan Bikhu Parekh yang dikenal dengan lima macam multikulturalisme. Untuk memudahkan memahami konsep ini, bisa dilihat pada skema di bawah ini:



Dari kelima macam Multikulturalisme di atas, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori pendekatan, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara Barat yang telah berhasil mengelola keberagaman (*diversity*) kultur dan etnis di negara mereka. *Pertama,* melalui pendekatan *integrasionis* atau *asimilasionis*. Pendekatan ini digunakan oleh pemerintah Perancis untuk menjaga kesatuan dengan menghindari eksistensi minoritas kebangsaan dan bahasa di dalam ikatan kewarganegaraannya. Mereka menamakan pendekatan ini dengan nama *jus soli.* Dengan pendekatan ini, setiap warga negara Perancis, apa pun asal etnisnya dapat menikmati persamaan, hak-hak bahasa, dan kultural mereka sebagai individu, bukan sebagai kelompok. *Kedua,* pendekatan *diferensialisme*. Pendekatan ini digunakan oleh Jepang, Singapura, dan Jerman. Kewarganegaraan di negara ini atas dasar darah atau asal-usul etnik. Mereka memberi istilah pendekatan ini dengan nama *jus sanguinis.* Misalnya warga negara Jerman, mereka adalah individu-individu yang mempunyai hubungan darah dengan nenek moyang bangsa Jerman. Warga negara pendatang meskipun sudah keturunan ketiga dan menggunakan bahasa Jerman, tetap tidak diakui nasionalitasnya sebagai warga negara Jerman. *Ketiga,* pendekatan *akomodasionis,* yaitu pendekatan yang mengadopsi klaim-klaim identitas yang ada. Pendekatan inilah yang menjadi model multikulturalisme. Pendekatan ini dapat dilihat di Australia dan Kanada (Zakiyuddin Baidhawi, 2005: 37). Dengan demikian, melihat dari bentuk-bentuk multikulturalisme tersebut, maka implementasi kehidupan multikultural ternyata memberi gambaran tentang kedewasaan suatu kultur, karena masing-masing kultur tidak memaksakan kultur lain harus melebur dengan kultur mereka demi untuk menyeragamkan kultur atau menyeragamkan kepercayaan. Karena bagaimanapun kepercayaan dan keyakinan merupakan pilihan bebas dari masing-masing kultur. Jadi, keberagaman tidak perlu dicegah atau dihapus melainkan dikelola secara bijaksana, sehingga terjalin hubungan yang manusiawi dan

harmonis antar komunitas budaya.

Multikulturalisme mengafirmasi bahwa ada cara berada "yang lain" (*the others*). Paradigma ini penekanannya bukan lagi pada komunitas-komunitas berhadapan dengan penguasa, akan tetapi sebagai komunitas yang terbentuk sebagai kelompok-kelompok swadaya masyarakat atau kelompok sub-sub kultur dari ragam etnik (*cross cultural*), di mana relasi antara kelompok-kelompok ini memakai konsep "dialogis" (Zakiyuddin Baidhawi, 2005: 2) dan *otherness* (cara berada "yang lain). Setiap kultur berinteraksi tanpa harus menanggalkan identitas, kekhasan dan keunikan dari masing-masing. Model ini menurut Gadis Arivia (2005: 9-11) akan menjamin keutuhan kultur dan tidak dapat disentuh oleh pemerintah yang umumnya lebih mengedepankan monokulturalisme dan mengabaikan pluralitas dan perbedaan kultur. Sikap penguasa yang mengambil "jalan aman" dengan cara melakukan penyeragaman, kemungkinan efektif pada masa tertentu, tetapi tidak efektif untuk masa-masa selanjutnya, karena orientasi pemahaman dan situasi kondisi kultur yang selalu berubah dari masa ke masa.

Dengan demikian, multikulturalisme bukan hanya sebatas wacana, melainkan "gerak" ideologi yang harus diperjuangkan. Multikulturalisme dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi dan keadilan, sehingga terwujud kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Multikulturalisme yang terkait dengan keadilan, secara luas dan mendalam dikemukakan oleh John Rawls dalam teorinya *A Theory of Justice.* John Rawls (2001: 65) berpendapat bahwa subjek primer keadilan adalah struktur dasar masyarakat. Struktur dasar masyarakat yang dimaksudkan oleh Rawls adalah institusi-institusi ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara atau wilayah. Struktur dasar tersebut sangat berpengaruh dalam hal pendistribusikan nilai-nilai sosial pada masyarakat. Adil atau tidak adilnya distribusi tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan Struktur dasar masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, menurut Rawls, sebelum mengatur skema distribusi nilai-nilai dalam masyarakat terlebih dahulu harus diatur dan ditertibkan terlebih dahulu Struktur Dasar masyarakat dalam suatu kultur. Ide pokok John Rawls adalah *justice as fairness,* yaitu teori keadilan yang memperhatikan kebebasan dan kesamaan pada semua individu dalam masyarakat, serta mendukung distrubusi nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial menurutnya harus didistribusikan secara adil dan fair, sehingga menguntungkan bagi semua orang yang terlibat dalam distribusi tersebut, baik bagi mereka yang belum beruntung maupun yang telah beruntung. Distribusi nilai-nilai tersebut diatur berdasarkan kesepakatan semua pihak, sehingga hasilnya akan *fair* dan tidak ada pihak yang dirugikan. Semua pihak memperoleh kebebasan dan kesetaraan, karena mereka memiliki dua kekuatan moral yang krusial, yaitu rasa keadilan dan kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan mencapai sebuah konsepsi mengenai kebaikan John Rawls (2001: 66).

Bila dikaitkan dengan Filosofi hidup Melayu, berdasarkan konsep keadilan Rawls, dapat dikatakan bahwa kultur Melayu–yang dalam teks sejarah dikenal sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan moral dan konsepsi mengenai kebaikan–akan lebih berkembang konsep kebaikannya jika dipadukan dengan konsep multikulturalisme John Rawls. Perpaduan konsep ini tentu masih harus dibincangkan secara serius, sehingga akan menemukan format yang tepat bentuk multikulturalisme untuk wilayah kultur melayu, karena akan ada konsekuensinya ketika menerima kultur lain, misalnya terjadi perubahan dalam tatanan hukum pada kultur Melayu dan adanya perubahan dalam sikap dan cara berpikir (rasional dan metodologis). Namun, tetap mempertahankan kekuatan jatidiri kultur Melayu dan kultur-kultur lainnya yang ada di wilayah Melayu.

Selain mengakui cara berada "yang lain", bisa juga dengan cara menjadikan diri seolah diperlakukan oleh orang lain. Misalnya, tatkala kultur Melayu bisa diterima dengan baik oleh kultur lain ketika sedang berada di luar wilayah kultur Melayu, maka seharusnyanya kultur Melayu juga harus menerima dengan baik kultur lain di wilayah kultur Melayu. Sehingga, setiap individu dalam kelompok kultur apa pun, akan merasa sebagai manusia seutuhnya ketika tidak ada tekanan dan diskriminasi. Dengan demikian, setiap kelompok kultur hidup dengan identitas mereka sendiri dan *enjoy* bersama kelompoknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Isaiah Berlin (1991: 19-27) bahwa setiap manusia dalam hidupnya membutuhkan kelompok. Menjadi manusia berarti mampu merasa *at home* di manapun mereka berada dengan caranya sendiri. Bila orang Melayu berhasil menggunakan paradigma ini, berarti kultur Melayu telah berhasil menangkap sinyal dalam mewujudkan harmonitas di wilayahnya. Dengan demikian, paradigma multikulturalisme telah dijadikan sebagai kebijakan

politik dalam kultur melayu umtuk menjawab tantangan-tantangan kehidupan dalam keberagaman. Multikulturalisme sebenarnya bukan hanya sebagai gagasan abstrak untuk kultur, melainkan tindakan yang terukur dari *moral integrity* yang sesungguhnya telah dimiliki oleh setiap kultur.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang dikembangkan oleh Orang Melayu masa lalu yang sedemikian kuat sehingga mampu memberi identitas Melayu sebagai "pembeda" dengan kultur lain adalah melalui bahasa simbol berupa pantun, pepatah, gurindam sebagai "bahasa halus" dalam berkomunikasi, sehingga mudah diterima oleh kultur lain.

Metode yang digunakan oleh Orang Melayu (baca: cendekiawan Melayu masa lalu) tersebut sangat cocok dengan konsep multikulturalisme yang secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat itu beragam dan majemuk. Dapat pula dipahami sebagai "kepercayaan" kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Multikulturalisme mengafirmasi bahwa ada cara berada "yang lain" (*the others*), sehingga melalui pembacaan peneliti tentang kultur Melayu dan konsep multikulturalisme dapat dikatakan bahwa bentuk multikulturalisme yang relevan untuk kultur Melayu kontemporer adalah dengan *integrasi kultural,* yakni dengan cara mengintegrasikan kultur-kultur minoritas ke dalam kultur Melayu yang mayoritas, sehingga akan terbentuk kultur baru, tanpa meleburkan dan menghilangkan identitas masing-masing kultur tersebut. Kultur Melayu dan kultur lain tetap eksis dengan ciri khasnya masing-masing. Bentuk ini biasanya dikenal dengan *salad bowl.*

Catatan: (Endnotes)

1 Penggunaan istilah Melayu memang sangat luas karena terkait dengan melayu sebagai etnis dan Melayu sebagai wilayah atau geografis. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis membatasi bahwa yang dimaksud Melayu dalam tulisan ini untuk menyebut Orang Melayu khusus di Provinsi Riau (etnis dan geografis) sebagai *prototype* Orang Melayu di Indonesia. Penulis menggunakan istilah Orang Melayu bagi Orang Melayu Riau meminjam istilah yang sering juga digunakan oleh tokoh Melayu Riau dalam karya-karya mereka, seperti: Tenas Efendi, UU Hamidy, Isjoni dan Soewardi MS. Adapun multikulturalisme dalam tulisan ini merupakan konsep filsafat kontemporer yang khusus membahas tentang bagaimana cara hidup bagi masyarakat yang multikultur. Kultur Melayu yang terbiasa hidup dalam keberagaman bisa bercermin dari konsep multikulturalisme, dengan tujuan selain untuk melihat persamaan dan perbedaan multikultur pada kultur Melayu dengan multikultur pada negara lain juga sebagai upaya memperkuat jati diri Melayu di era global saat ini.

2 Rina Rehayati, M.Ag adalah Ketua Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

3 *Utilitarian* adalah teori Teleologis Universalis yang menilai benar salahnya suatu perbuatan manusia ditinjau dari segi manfaat akibatnya. Dengan kata lain, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang mendatangkan akibat-akibat baik bagi kepentingan semua orang yang dapat kita pengaruhi. Misalnya: Berbohong perbuatan tidak baik, tapi apabila tidak berbohong akibatnya lebih buruk, maka berbohong dalam konteks ini dianggap baik, karena ada upaya untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dari akibat-akibat baik melalui berbohong. Lihat: Juhaya S. Praja (2008: 64; Bertens, 1994: 246-247).

4 Pantun, pepatah, dan Gurindam merupakan bahasa simbol bagi orang Melayu untuk menyampaikan nilai-nilai, filosofi, pendidikan, dan pengajaran. Gurindam yang sangat terkenal di dunia akademik adalah Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji. Seorang sastrawan dan Pahlawan Nasional yang berasal dari Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau.

5 Istilah *Multikulturalisme Butik"* yang dimaksudkan oleh Stanley Fish adalah gejala yang ditandai dengan relasi superfisial dan kosmetik dengan objek afektifnya. Perbedaan yang terdapat dalam masyarakat multikultural dirayakan dalam *fashion-fashion*, festival akhir pekan dan restoran etnik. Namun, di balik itu tetap saja ada persoalan yang tidak terselesaikan. Penghargaan terhadap pluralitas dan multikultural hanya sebatas tontonan yang eksotik. Lihat: B. Hari Juliawan (2004: 9).

6 Paradigmanya mencakup subjek-subjek mengenai: ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang, seperti: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Paradigma seperti ini kemudian memunculkan kajian *ethnic studies.* Tujuannya untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas.

Daftar Referensi

A. Alois Nugroho. "Benturan Peradaban, Multikulturalisme dan Fungsi Rasio". *Makalah.*

Abdul Kadir Ibrahim (penanggung jawab). (2004). *Filosofi Dunia Melayu.* Tanjung Pinang: RBM.

Achmad Syauqi Ngainun Naim. (2008). *Pendidikan*

Multikultural: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Agus Salim. (2002). *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ainul M. Yaqin. (2007). *Pendidikan Multikultural.* Cet. II. Yogyakarta: Pilar Media.

Andre Ata Ujan (ed.). (2009). *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan* Jakarta: PT. Indetz.

Andrik Purwasito. (2003). *Komunikasi Multikultural.* Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Andy Dermawan. (2009). *Dialektika Islam dan Multikulturalisme di Indonesia.* Yogyakarta: PT. Kurnia Alam Semesta.

Azyumardi Azra. (2001). *Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia.* cet. Ke-5. Yogyakarta: Kanisius.

Badcock, R. Christopher. (2008). *Levi Strauss: Stucturalism and Sociological Theory.* Heddi Shri Ahimsa Putra (pen.), *Strukturalisme dan Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bauman, Gerd. (1999). *The Multicultural Riddle; Rethinking National, Ethnic, and Religious Identities.*New York: Routledge.

Budhy Munawar Rachman (Penyunting). (2006). *Ensiklopedi Nurcholish Madjid.* Vol. 4. Jakarta: Mizan.

Choirul Mahfud. (2009). *Pendidikan Multikultural.* Cet. Ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Collins, T. James. (2011). *Bahasa Melayu Bahasa Dunia: Sejarah singkat.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Durkheim, Emile. (1976). *The Elementary Form of Religion Life*, London: George Allen dan Unwin Ltd.

-------. (2005). *The Elementary Forms of the Religious Life.* terj. Inyiak Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD.

Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana.* Yogyakarta: LkiS.

Esposito, John L. (1995). *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World.* Vol. 2 & 4. New York: Oxford University Press.

Gadis Arivia. (2005). "Multikulturalisme: Re-Imagining Agama". *Jurnal Refleksi*: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Vol. VIII, no. 1, 2005.

Geertz, Clifford. (1960). *The Religion of Java.* New York: The Free Press.

-------. (1992). *Tafsir Kebudayaan.* Yogyakarta: Kanisius.

H.A.R. Tilaar. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hari B. Juliawan. (2004). "Kutukan Menara Babel" dalam *Basis,* No. 01-02, tahun ke-53, Januari-Februari, 2004.

Heddy Shri Ahimsa-Putra. (2001). *Strukturalisme Levy Strauss, Mitos dan Karya Sastra.* Yogyakarta: Bentang Budi.

------- (ed.). (2007). *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan,*Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.

-------. (2008) Kata Pengantar dalam buku Christoper R. Badcock. *Levi-Strauss:Stucturalism and Sociological Theory,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hefner, Robert W. (ed.). (2011). *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan.* Cet. Ke-5. Yogyakarta: Kanisius.

Hinnells, John R. (1995). *The Penguin Dictionary of Religions.* London: Penguin Books.

Hornby, AS. (1980). *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English.* Third Edition. Oxford University Press.

http://www.scribd.com/doc.26994716/konsep-kuasa-Michel, diakses tanggal 20 Februari 2010.

http://www.scribd.com/bahan-sejarah-teori, diakses tanggal 7 April 2010.

Isjoni. (2002). *Orang Melayu: Sejarah, Sistem, Norma dan Nilai Adat.* Pekanbaru: UNRI Press.

-------. (2007). *Orang Melayu di Zaman yang Berubah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ismail Husein. (2001). *Tamadun Melayu: Menyongsong Abad Kedua Puluh Satu.* Bangi: University Kebangsaan Malaysia.

Jary, David and Julia Jary. (t.th.). *The Harper Collins Dictionary of Sociology.* New York: Harper Collins Publishers.

Jones, PIP. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Khadziq. (2009). *Islam dan Budaya Lokal: Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat.* Yogyakarta: Teras.

Komaruddin Hidayat. (2008). *Islam Kebangsaan dan Kemerdekaan Indonesia.* Yogyakarta: Kanisius.

Kuhn, Thomas S. (1989). *The Structure of Scientific Revolutions.* Tjun Surjaman (pen.), *Peran Paradigma dalam Revolusi Sains.* Bandung: Remaja karya Offset.

Kurzweil, Edith. (2004). *The Age of Structuralism, Levi-Strauss to Foucault.* Diterjemahkan oleh Nurhadi. *Jaring Kuasa Strukturalisme Strukturalisme: Dari Claude Levi-Strauss sampai Foucault*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Kymlicka, Will. (1990). *Contemporary Political Philosophy: an Introduction.* New York: Oxford University.

-------. (2002). *Multicultural Citizenship.* alih bahasa oleh F. Budi Hardiman. *Kewargaan Multikultural.* Jakarta: Pustaka LP3ES.

Lash, Scott. (2004). *The Sociology of Postmodern,* alih bahasa A. Gunawan Admiranto. *Sosiologi PostModern*. Yogyakarta: Kanisius.

Luthfie A. Assyaukanie. (1998). "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer". *Jurnal Paramadina.* Volume I Nomor 1, Juli–Desember 1998.

MA. Siregar. (t.th.). *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris.* T.tp.: t.p.

M.S. Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat.* Cet. Ke-1. Yogyakarta: Paradigma.

Moeslim Abdurrahman. (2007). *Krisis Sosial, Krisis Politik, Krisis Bangsa Majemuk: Beberapa Catatan Reflektif.* Yogyakarta: Impulse.

Monk, Robert C. Dkk. (1979). *Exploring Religious Meaning*. London: Prentice Hall International, Inc.

Moodod, Tariq. (2007). *Multikulturalism: A Civic Idea.* USA: Polity Press.

Nasrul Azwar. (2007). "Mengintip Visi Riau 2020". *Kompas.* 30 Oktober 2007

Nottingham, Elizabet K. (1997). *Agama dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Nur Syam. (2005). *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LkiS.

-------. (2009). *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: dari Radikalisme Menuju Kebangsaan.* Yogyakarta: Kanisius.

Pals, Daniel L. (2001). *Seven Theories of Religion.* Ali Noer Zaman (pen), cet. 1. Yogyakarta: Qalam.

Parekh, Bikhu. (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory.* Massachussetts: Harvard University Press.

Parsudi Suparlan. (1995). *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

-------. (2004). "Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural dan Minoritas", *Makalah,* dipresentasikan dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam *Landscape* Multikultural, Mungkinkah di Indonesia? Wisma PKBI, 10 Agustus 2004.Pemprov Riau. (2006). Profil Provinsi Riau.

Rawls, John. (2001). *A Theory of Justice.* revised edition. Harvard University Press.

Rida Ahida (2008). *Keadilan Multikultural.* Jakarta: Ciputat Press.

Ritzer, George, et.al. (2010). *Sociological Theory.* Nurhadi (pen.), *Teori Sosiologi*: *dari Teori Klasik Sampai Perkembanagn Mutakhir Teori Postmodern*. cet. IV. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Runes, Dagobert D. (1962). *Dictionary of Philosophy*. New Jersey: Littlefield, Adams & Co.

Smith, Jonathan Z. (ed.). (1995). *The Harpercollins Dictionary of Religion.* San Francisco: Herper SanFrancisco.

Sutrisno, et.al. (2005). *Sejarah Filsafat Nusantara.* Yogyakarta.

Suwardi MS. (2008). *Dari Melayu ke Indonesia: Peranan Kebudayaan Melayu dalam Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Bangsa.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thwaites, Tony, et.al. (2009). *Introducing Cultural and Media Studies: Sebuah Pendekatan Semiotik.* Yogyakarta: Jalasutra.

Tibi, Bassam. (1999). *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Tim Peneliti UNRI. (2005). *Budaya Tradisional Riau.* Pekanbaru: UNRI.

UU. Hamidy. (1993). *Kerukunan Hidup Beragama di Daerah Riau.* Pekanbaru: UIR Press.

-------. (1998) *Teks dan Pengarang di Riau* Pekanbaru: UNRI Press.

-------. (t.th.) *Orang Melayu di Riau.* Pekanbaru: UIR Press.

-------. (2002). *Riau Doeloe-Kini dan Bayangan Masa Depan.* Pekanbaru: UIR Press.

-------. (2003). *Riau Sebagai Pusat Bahasa dan Kebudayaan Melayu,* Pekanbaru: UNRI Press.

-------. (2004). *Good Governance dalam Perspektif Budaya Melayu.* Riau: Pemprov Riau.

"Visi Riau 2020; Pusat Kebudayaan Melayu", *Kompas,* Jumat, 25 Mei 2001.

Yusmar Yusuf. (2009). *Studi Melayu.* Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Zakiyuddin Baidhawiy. (t.th.). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural.* Jakarta: Erlangga.